

## **PERAN E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG)**

Indra Kristian<sup>1</sup>  
Rira Nuradhawati<sup>2</sup>  
Harky Ristala<sup>3</sup>

*Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi<sup>1,2,3</sup>*

*Jl. Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat 40531<sup>1,2,3</sup>*

Alamat email Koresponden: [technican2007@gmail.com](mailto:technican2007@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Implementing e-government has become an important strategy in increasing public transparency in the digital era. This research aims to analyze the role of e-government in increasing public transparency in the Bandung Regency Government. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with government officials, public service users, as well as observations of official websites and e-government applications used in Bandung Regency. The research results show that the implementation of e-government in Bandung Regency has succeeded in increasing access to public information, speeding up administrative services, and increasing local government accountability. However, there are a number of obstacles faced, such as limited technological infrastructure and human resource capacity. The implications of this research indicate that strengthening information technology systems and increasing human resource capacity through intensive training is necessary to optimize the implementation of e-government in supporting public transparency. This research makes a significant contribution to understanding the relationship between e-government and transparency at the local government level, as well as offering relevant policy recommendations.*

**Kata Kunci/Keywords :** *E-government, Public Transparency, Accountability, Information Technology, Public Services, Government Policy.*

### **PENDAHULUAN**

Transparansi publik merupakan salah satu elemen kunci dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, atau yang sering disebut sebagai good governance. Keterbukaan informasi publik menjadi penting

untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi (Andrews, 2017). Di era digital saat ini, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah berupaya memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan e-government untuk meningkatkan transparansi tersebut (Heeks, 2018). E-government merupakan sistem yang memungkinkan penyediaan layanan publik secara lebih efisien, transparan, dan responsif dengan memanfaatkan teknologi digital (Layne & Lee, 2001). Pemerintah Indonesia, melalui berbagai kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel (Purwanto et al., 2020). Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah dengan potensi besar dalam hal pelayanan publik, juga telah mengadopsi e-government melalui berbagai platform digital untuk memperluas akses informasi publik dan meningkatkan keterlibatan warga (Setiawan & Hamzah, 2021). Namun, meskipun e-government diyakini dapat memperbaiki kualitas transparansi, pelaksanaannya tidak luput dari tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur dan kapabilitas sumber daya manusia (Yulianto, 2019). Dalam konteks ini, penting untuk memahami sejauh mana e-government mampu meningkatkan transparansi publik, khususnya di tingkat pemerintahan daerah seperti Kabupaten Bandung (Rahayu, 2020). Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi peran e-government dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Kajian ini menjadi relevan dalam mendukung upaya reformasi birokrasi yang terus digalakkan pemerintah untuk mencapai good governance (Siregar, 2021).

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengimplementasikan sistem e-government sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, meskipun inisiatif ini telah diadopsi, masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapannya yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas e-government dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang diharapkan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang masih terbatas, khususnya di wilayah yang belum terjangkau layanan internet yang memadai (Rohman, 2019). Selain itu, kapabilitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi digital sering kali menjadi hambatan dalam pengelolaan sistem e-government secara efektif (Marini, 2020). Tidak hanya itu, resistensi dari birokrasi yang sudah terbiasa dengan sistem manual juga menjadi kendala signifikan dalam proses adaptasi teknologi ini (Wahono, 2021). Kesenjangan

digital antara daerah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Bandung semakin memperkuat hambatan ini, di mana akses terhadap layanan e-government tidak merata (Nurhayati, 2018). Dengan demikian, muncul pertanyaan tentang sejauh mana penerapan e-government di Kabupaten Bandung dapat benar-benar meningkatkan transparansi publik. Apakah inisiatif ini mampu mengatasi tantangan-tantangan struktural dan budaya birokrasi yang ada? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggali lebih dalam peran e-government dalam menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang masih ada. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan terkait pengembangan e-government di Kabupaten Bandung, sehingga dapat mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik (Hartono, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran e-government dalam meningkatkan transparansi publik di Pemerintah Kabupaten Bandung. Transparansi publik, sebagai elemen penting dari good governance, berfungsi untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat (Prasojo, 2017). Penerapan e-government diharapkan dapat memfasilitasi akses informasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan bagi masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi (Indrajit & Djokopranoto, 2006). Melalui pendekatan penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi sejauh mana e-government di Kabupaten Bandung mampu memperbaiki kualitas layanan publik serta mendorong keterbukaan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan (Effendi, 2019). Penelitian ini juga akan mengukur tingkat efektivitas e-government dalam mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik (Susanto, 2018). Secara spesifik, tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi e-government di Kabupaten Bandung, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih ada dalam pelaksanaannya (Iskandar, 2020). Dengan melakukan evaluasi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat guna mendukung keberlanjutan program e-government (Mustafa, 2021). Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik terkait good governance dan transformasi digital dalam pemerintahan, serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah lain dalam mengimplementasikan e-government (Rahayu, 2020).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis, terutama dalam konteks tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai peran e-government dalam meningkatkan transparansi publik, yang

merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan good governance (Dwiyanto, 2011). Penelitian ini juga berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat mendukung keterbukaan informasi dan akuntabilitas publik di tingkat pemerintahan daerah (Heeks, 2001). Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam mengembangkan kebijakan terkait e-government yang lebih efektif dan efisien (Misbahuddin, 2019). Temuan penelitian ini akan memberikan panduan bagi para pengambil kebijakan mengenai strategi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi e-government, seperti keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia (Wahab, 2018). Lebih jauh, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dalam merancang program pelatihan yang lebih sesuai untuk meningkatkan kemampuan digital para pegawai pemerintah daerah (Prasetyo, 2020). Selain itu, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi masyarakat umum, karena dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait pelayanan publik dan proses administrasi pemerintahan (Fukuyama, 2015). Dengan demikian, penelitian ini berpotensi meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Nasution, 2020). Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan akuntabel di era digital (Turner & Hulme, 2002).

#### PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bandung, ditemukan bahwa implementasi e-government telah diterapkan melalui berbagai platform digital yang dirancang untuk mempermudah akses informasi publik. Sistem ini mencakup layanan administrasi berbasis daring, seperti pendaftaran perizinan, pembayaran pajak daerah, dan akses informasi mengenai kebijakan pemerintah. Dari hasil wawancara dengan pegawai pemerintah dan pengguna layanan, mayoritas responden mengakui bahwa e-government mempermudah mereka dalam memperoleh informasi dan menyelesaikan berbagai urusan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Selain itu, layanan ini juga memungkinkan warga untuk memantau perkembangan pengajuan dokumen secara real-time, sehingga transparansi dalam proses administrasi meningkat. Namun, terdapat perbedaan signifikan antara pengguna di wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal akses terhadap layanan e-government, di mana wilayah pedesaan mengalami kendala dalam hal infrastruktur teknologi dan akses internet. Dari segi operasional, beberapa pegawai pemerintah menyatakan

bahwa penggunaan sistem e-government telah mengurangi beban kerja manual mereka, tetapi masih ada kendala dalam hal pelatihan dan kapabilitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi ini secara optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua layanan publik telah terintegrasi sepenuhnya ke dalam platform digital, sehingga masih ada beberapa proses yang dilakukan secara manual. Pada aspek keamanan data, ditemukan bahwa terdapat kekhawatiran terkait perlindungan informasi pribadi yang diakses melalui platform e-government. Meskipun demikian, mayoritas pengguna merasa puas dengan kecepatan layanan yang ditawarkan oleh sistem ini dibandingkan dengan metode konvensional. Beberapa responden juga menyebutkan bahwa layanan e-government meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik. Dalam hal partisipasi publik, ditemukan bahwa penggunaan e-government mendorong warga untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan melalui fitur pengaduan dan saran yang tersedia di platform tersebut. Responden dari kalangan bisnis juga mengakui manfaat dari e-government, khususnya dalam pengajuan izin usaha dan pembayaran retribusi. Namun, ditemukan bahwa sebagian besar warga yang tinggal di wilayah dengan akses internet yang rendah masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem ini. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-government di Kabupaten Bandung telah memberikan dampak positif dalam memfasilitasi layanan publik dan meningkatkan transparansi, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi agar implementasinya lebih merata dan optimal di seluruh wilayah.

Temuan mengenai implementasi e-government di Kabupaten Bandung menunjukkan adanya peningkatan transparansi dan efisiensi layanan publik, namun masih dihadapkan pada tantangan signifikan terkait akses dan kapabilitas. Peningkatan transparansi yang ditemukan sejalan dengan studi Heeks (2001), yang menyatakan bahwa e-government mampu mengurangi tingkat kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas publik melalui keterbukaan informasi. Namun, kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang ditemukan dalam penelitian ini menggemakan temuan Dwiyanto (2011), yang menyoroti bahwa infrastruktur teknologi yang tidak merata sering kali menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan reformasi digital di pemerintahan daerah. Sementara itu, hasil ini juga diperkuat oleh Marini (2020), yang menyatakan bahwa kapabilitas sumber daya manusia dalam pengelolaan e-government sering kali masih rendah, sehingga pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai menjadi hal krusial untuk mencapai optimalisasi. Masalah keamanan data yang teridentifikasi dalam temuan ini juga sejalan dengan temuan Wahab (2018),

yang menekankan perlunya sistem perlindungan data yang lebih kuat dalam implementasi teknologi digital di sektor publik. Dengan demikian, meskipun e-government telah membuktikan efektivitasnya dalam mempercepat layanan dan meningkatkan transparansi, masalah-masalah struktural seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas sumber daya manusia masih harus segera diatasi untuk memastikan pemerataan manfaat e-government di seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Selain itu, pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi menjadi isu yang mendesak untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan e-government agar kepercayaan publik dapat terus meningkat (Susanto, 2018). Oleh karena itu, reformasi kebijakan dan penyesuaian strategi implementasi sangat diperlukan agar e-government dapat sepenuhnya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Temuan kedua dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun e-government di Kabupaten Bandung telah diterapkan, terdapat kendala signifikan dalam hal kapasitas sumber daya manusia yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Banyak pegawai pemerintah daerah yang mengaku belum sepenuhnya terbiasa dengan teknologi yang digunakan dalam sistem e-government, sehingga mempengaruhi kecepatan dan akurasi layanan yang diberikan. Beberapa pegawai juga menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan masih kurang memadai, baik dari segi durasi maupun materi yang diajarkan. Selain itu, ditemui pula adanya ketergantungan terhadap tenaga ahli IT eksternal dalam mengoperasikan sistem, yang mengindikasikan keterbatasan pengetahuan teknis di kalangan pegawai internal. Beberapa responden menyebutkan bahwa meskipun ada upaya pelatihan, tingkat adopsi teknologi masih rendah di kalangan pegawai senior yang lebih terbiasa dengan proses manual. Hal ini menyebabkan beberapa fungsi e-government tidak berjalan optimal, terutama dalam hal pengelolaan data dan administrasi publik. Di sisi lain, pegawai yang lebih muda cenderung lebih cepat beradaptasi dengan sistem digital, namun jumlahnya masih terbatas. Selain faktor internal, ditemukan juga bahwa dukungan teknis yang kurang memadai dari pemerintah pusat mempengaruhi keberlangsungan sistem e-government di tingkat daerah. Beberapa layanan publik masih mengalami gangguan teknis, seperti sistem yang sering kali lambat atau mengalami downtime, terutama pada jam kerja yang sibuk. Keterbatasan anggaran untuk perawatan sistem juga disebutkan sebagai faktor penghambat dalam menjaga kestabilan e-government. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang mendukung masih menjadi tantangan utama dalam implementasi e-government di Kabupaten Bandung. Pegawai yang kurang terlatih dan dukungan teknis yang terbatas menjadi hambatan yang perlu segera diatasi

agar sistem e-government dapat berjalan lebih efektif. Temuan ini menekankan pentingnya pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta peningkatan infrastruktur teknologi agar implementasi e-government dapat mencapai tujuannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Temuan kedua terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan e-government di Kabupaten Bandung mencerminkan hambatan umum yang juga ditemukan dalam berbagai studi sebelumnya. Keterbatasan pelatihan dan adopsi teknologi di kalangan pegawai senior sejalan dengan penelitian Dwivedi et al. (2012), yang menemukan bahwa resistensi terhadap perubahan teknologi sering kali muncul akibat kebiasaan kerja manual yang telah lama dipraktikkan. Faktor ini diperkuat oleh temuan Wahid (2019), yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat bergantung pada kesiapan mental dan keterampilan teknis para pegawai. Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan dukungan teknis yang memadai juga menjadi isu krusial, sebagaimana disampaikan oleh Heeks (2001), di mana keberlanjutan sistem e-government di daerah sering kali terhambat oleh kurangnya komitmen pendanaan untuk pengembangan infrastruktur. Gangguan teknis seperti downtime dan kelambatan sistem menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi di tingkat daerah masih belum optimal, sebagaimana dikemukakan oleh Yulianto (2020), yang menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur digital di tingkat lokal. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Carter dan Bélanger (2005), yang menyoroti pentingnya peningkatan kemampuan digital pegawai untuk mendorong efektivitas e-government. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi e-government, diperlukan kombinasi antara peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, serta dukungan teknis dan pendanaan yang konsisten.

Temuan ketiga dari penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem e-government di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya terintegrasi secara efektif antara berbagai sektor layanan publik. Beberapa sektor seperti perizinan, pembayaran pajak, dan administrasi kependudukan telah mengadopsi sistem berbasis daring, namun masih ada beberapa layanan yang belum memanfaatkan e-government secara optimal. Layanan kesehatan dan pendidikan, misalnya, masih banyak yang menggunakan metode manual dalam pengolahan data dan administrasi. Beberapa responden menyatakan bahwa tidak semua proses administrasi dapat diselesaikan melalui sistem e-government, sehingga masyarakat masih harus melakukan kunjungan langsung ke kantor pemerintah untuk beberapa keperluan tertentu. Selain itu, ditemukan bahwa tidak ada standar yang konsisten dalam penerapan e-

government di berbagai sektor, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan melalui platform digital ini bervariasi. Beberapa layanan e-government berjalan lancar dan responsif, sementara layanan lain sering mengalami kendala teknis, seperti kesalahan sistem dan waktu tunggu yang lama. Dari sisi masyarakat, ada ketidakseimbangan dalam penggunaan e-government, di mana mereka yang lebih melek teknologi cenderung memanfaatkan layanan ini dengan baik, sedangkan masyarakat yang kurang paham teknologi lebih memilih menggunakan layanan manual. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses layanan publik, terutama di kalangan masyarakat yang lebih tua atau kurang familiar dengan teknologi. Di sisi lain, pegawai pemerintah juga menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan data antar-sektor karena sistem yang digunakan belum sepenuhnya terhubung satu sama lain. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun e-government telah diimplementasikan, masih terdapat kekurangan dalam hal integrasi sistem dan kesetaraan akses layanan publik. Keterbatasan ini juga menyebabkan beberapa layanan tidak dapat dijalankan secara maksimal, mengakibatkan masyarakat masih mengandalkan metode konvensional. Secara keseluruhan, implementasi e-government di Kabupaten Bandung masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat terintegrasi dengan baik di semua sektor dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dalam menganalisis temuan ketiga dari riset ini, yang menyoroti peran e-government dalam meningkatkan transparansi publik di Kabupaten Bandung, terlihat bahwa penerapan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan secara signifikan telah memperbaiki interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Studi sebelumnya menegaskan bahwa e-government tidak hanya mendorong keterbukaan informasi, tetapi juga mengurangi potensi korupsi melalui mekanisme pelaporan yang lebih transparan (Krishnan, 2020; Jafari & Rezaei, 2019). Penggunaan portal daring untuk pemantauan layanan publik secara real-time telah memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah, sehingga menciptakan akuntabilitas yang lebih tinggi (Wirtz et al., 2017). Selain itu, menurut Abdullah dan Rahman (2021), digitalisasi administrasi publik memberikan akses yang lebih luas terhadap data pemerintah, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan kesenjangan akses internet masih perlu diatasi agar manfaat e-government dapat dirasakan secara merata (Nguyen & Vuong, 2020). Temuan ini sejalan dengan tren regional yang menunjukkan peningkatan adopsi e-government sebagai alat untuk efisiensi dan demokratisasi (Hassan, 2018). Penelitian Setiawan dan Sukma (2022) juga menekankan pentingnya investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan



masyarakat untuk memastikan kelangsungan reformasi layanan publik yang berbasis teknologi. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga komponen penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di era digital.

### KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan e-government di Kabupaten Bandung memiliki potensi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi publik. Berdasarkan temuan yang telah diuraikan, e-government bukan hanya sekadar alat digitalisasi birokrasi, melainkan sebuah mekanisme penting yang mampu mendorong keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Meskipun inisiatif e-government telah diterapkan, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, literasi digital masyarakat yang masih rendah, serta ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam penerapan sistem ini. Upaya peningkatan kolaborasi antara pemangku kepentingan juga penting untuk memastikan agar manfaat e-government dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan e-government telah diakui sebagai salah satu solusi utama dalam reformasi birokrasi, implementasi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bandung, masih membutuhkan perbaikan signifikan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan regulasi yang mendukung penerapan teknologi dalam pelayanan publik, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan transparansi berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu, kesenjangan antara pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan berbasis e-government juga harus menjadi perhatian, mengingat bahwa keberhasilan e-government sangat bergantung pada kemudahan akses dan keterlibatan masyarakat.

Ke depan, penting bagi pemerintah Kabupaten Bandung untuk terus melakukan evaluasi dan pembaruan sistem e-government agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan teknologi yang lebih canggih seperti kecerdasan buatan dan big data juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, serta memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, e-government berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan transparansi publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M., & Rahman, S. (2021). Digital governance and public trust: An empirical analysis. *Journal of Public Administration*, 45(3), 321-339.
- Andrews, M. (2017). *Public sector reform: What works and why?*. World Bank Group.
- Carter, L., & Bélanger, F. (2005). The utilization of e-government services: Citizen trust, innovation and acceptance factors. *Information Systems Journal*, 15(1), 5-25.
- Dwivedi, Y. K., Weerakkody, V., & Janssen, M. (2012). Moving towards maturity: Challenges to successful e-government implementation and diffusion. *Electronic Government, an International Journal*, 9(1), 1-6.
- Dwiyanto, A. (2011). *Mengelola tata pemerintahan yang baik*. Gadjah Mada University Press.
- Effendi, H. (2019). Peran e-government dalam pelayanan publik: Studi kasus di pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 56-67.
- Fukuyama, F. (2015). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hartono, I. (2020). E-government dan tata kelola pemerintahan yang baik: Analisis kebijakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(4), 23-33.
- Hassan, A. (2018). The evolution of e-governance in Southeast Asia: Case studies in local government. *Journal of Governance Studies*, 12(4), 102-120.
- Heeks, R. (2001). *Reinventing government in the information age: International practice in IT-enabled public sector reform*. Routledge.
- Heeks, R. (2018). *Information systems and public sector reform*. Routledge.
- Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). *E-government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Offset.
- Iskandar, T. (2020). Hambatan implementasi e-government di tingkat pemerintahan daerah. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Publik*, 8(1), 34-45.
- Jafari, A., & Rezaei, M. (2019). *E-government and corruption reduction in*

- developing countries. *International Journal of Public Policy*, 28(2), 59-74.
- Krishnan, P. (2020). E-government initiatives and their impact on public sector transparency. *Governance and Public Sector Innovation Journal*, 10(2), 214-230.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88-98.
- Kristian, I., & Fajar Ikhsan, O. M. (2024). Integrating Community-Based Approaches into National Disaster Management Policies: Lessons from Recent Natural Disasters. *The International Journal of Law Review and State Administration*, 2(4), 115-125. <https://doi.org/10.58818/ijlrsv2i4.150>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122-136.
- Marini, R. (2020). Kapabilitas SDM dalam pengelolaan sistem e-government. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 78-89.
- Misbahuddin, M. (2019). Strategi pengembangan e-government di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 45-57.
- Mustafa, M. (2021). Rekomendasi kebijakan dalam pengembangan e-government. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(4), 89-101.
- Nasution, H. (2020). E-government dan partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 10(1), 34-45.
- Nguyen, T., & Vuong, Q. (2020). Digital inequality and the future of public service delivery. *Technology in Governance Quarterly*, 8(1), 79-95.
- Nurhayati, D. (2018). Kesenjangan digital dan akses e-government di perdesaan. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(2), 45-56.
- Prasetyo, D. (2020). Pelatihan digital bagi aparatur pemerintah daerah: Analisis kebijakan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 67-78.
- Prasojo, E. (2017). Reformasi birokrasi dan good governance di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwanto, E., Suryadi, A., & Prasetyo, D. (2020). Kebijakan keterbukaan informasi publik dan SPBE. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 45-60.
- Rahayu, S. (2020). E-government dan transparansi publik: Studi kasus Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(3), 45-58.

- Rohman, A. (2019). Kesiapan infrastruktur teknologi dalam penerapan e-government di Indonesia. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(2), 34-47.
- Setiawan, A., & Sukma, F. (2022). Indonesian e-government: Progress, challenges, and future prospects. *Journal of Southeast Asian Public Administration*, 9(1), 54-68.
- Setiawan, F., & Hamzah, I. (2021). Implementasi e-government dalam pelayanan publik di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 25-33.
- Siregar, T. (2021). Reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik. *Jurnal Tata Kelola*, 7(4), 15-28.
- Subagyo, A., Ip, S., Kristian, I., Ip, S., & Kom, S. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Aksara Global Akademia.
- Susanto, T. (2018). Peran e-government dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi korupsi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 9(2), 78-91.
- Turner, M., & Hulme, D. (2002). *Governance, administration and development: Making the state work*. Palgrave Macmillan.
- Wahab, S. (2018). Hambatan implementasi e-government di Indonesia: Analisis kebijakan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(4), 22-31.
- Wahono, B. (2021). Hambatan birokrasi dalam implementasi e-government di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(3), 112-124.
- Wirtz, B. W., Piehler, R., & Ullrich, S. (2017). Citizen participation in e-government: A systematic review. *International Journal of Electronic Government Research*, 13(4), 19-43.
- Yulianto, E. (2020). Infrastructure readiness for e-government implementation in local governments. *Journal of Information Technology and Public Policy*, 8(3), 25-39.